

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Konflik antara Armenia-Azerbaijan dimulai pada akhir tahun 80-an karena kekacauan yang terjadi akibat konflik etnis yang terjadi sebagai konsekuensi dari perebutan wilayah yang melibatkan Azerbaijan dan Armenia. Kekacauan ini muncul serentak dengan kekacauan yang terjadi selama proses runtuhnya Uni Soviet, dimana etnonasionalisme dari etnis non – Rusia di masing-masing wilayah mereka meningkat hingga mengantarkan kepada kemerdekaannya. Disintegrasi Uni Soviet yang menyebabkan runtuhnya tatanan dunia bipolar dan dominasi dua kekuatan pada saat Perang dingin di ranah hubungan internasional. Salah satu permasalahan yang muncul setelah runtuhnya Uni Soviet adalah permasalahan di wilayah Kaukasus. Penyebab permasalahan di bekas wilayah Kaukasus yaitu seputar permasalahan perbatasan dan energi. Kaukasus merupakan wilayah yang kompleks karena menghubungkan Rusia dengan wilayah Asia. Salah satu permasalahan yang penulis angkat adalah konflik di Nagorno – Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan.

Nagorno dan Karabakh merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak di kawasan selatan Kaukasus. Nagorno dan Karabakh merupakan wilayah strategis karena menjadi jalur darat yang menghubungkan kawasan Timur Tengah – Asia Tengah dengan Eropa timur. Wilayah Nagorno – Karabakh secara geografis terletak di wilayah Azerbaijan, tetapi komposisi penduduknya didominasi oleh etnis Armenia. Sejak Abad ke 19 wilayah tersebut menjadi bagian dari Rusia. Ketika terjadi “Revolusi Merah” oleh kaum komunis Rusia pada tahun 1917, wilayah Kaukasus termasuk Nagorno – Karabakh sempat melepaskan diri untuk membentuk negara baru bernama “Federasi Transkaukasian”. (Niam,MM, dkk, hlm.13)

Asal-usul konflik di Nagorno-Karabakh terjadi pada abad ke-19-an, ketika Armenia dan Azerbaijan sama-sama memperthankan kawasan ini. Wilayah didominasi (94%) oleh penduduk Armenia yang dipindahkan ke Soviet Azerbaijan sebagai bagian dari kebijakan Joseph Stalin pada tahun 1923. Meskipun rezim Soviet otoriter, Karabakh Armenia secara berkala memperebutkan status *enclave* dalam perjalanan dari 70 tahun pemerintahan Soviet dan dimohonkan akan ditransfer ke dalam wilayah Republik Sosialis Soviet Armenia pada tahun 1945, 1965, 1977, dan 1987, tetapi semua upaya ini ditolak oleh Uni Soviet.

Uni Soviet akhirnya memutuskan untuk menjadikan Nagorno – Karabakh sebagai wilayah dari Azerbaijan dengan status otonomi khusus pada tahun 1923. Pasca kebijakan Uni Soviet tersebut, kondisi wilayah Kaukasus bisa dibilang stabil dan sengketa soal Nagorno – Karabakh nyaris tidak pernah muncul ke permukaan lagi. Namun situasinya mulai berubah sejak Mikhail Gorbachev naik menjadi presiden Uni Soviet pada tahun 1985 & ia mulai memberikan kebebasan pada masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depannya sendiri dikenal sebagai kebijakan *glasnost* dan *perestroika*. (Nagorno-Karabakh Conflict Perestroika and the Re-Emergence of the Conflict: 1987-91 hlm.14) Kebijakan Gorbachev tersebut pada akhirnya memunculkan kembali masalah sengketa Nagorno – Karabakh di mana saat itu, Nagorno – Karabakh menjadi bagian dari wilayah Armenia yang ditentang oleh Azerbaijan selaku pemilik resmi wilayah Nagorno – Karabakh saat itu.

Sejak keruntuhan Uni Soviet usai perang dingin, konflik militer di Kaukasus Selatan mengundang partisipasi aktif dan menentukan dari Rusia sebagai negara yang didominasi bidang keamanan dalam pilar utama kebijakan negara. Tidak bisa dipungkiri Rusia masih memiliki ambisi di regional Kaukasus dan kehadiran militernya adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Kaukasus. Rusia memiliki kompetensi dalam mempengaruhi kebijakan negara-negara Kaukasus yang berasal dari rute penting regional dengan dunia sekitar yang didominasi oleh Rusia, baik dalam hal ekonomi dan

energi. Rusia memandang negara-negara post-Soviet sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Tekanan-tekanan secara langsung tidak lagi digunakan. Rusia memanfaatkan peninggalan historis dan ikatan budaya untuk menjadi mediator alami sebagai orientasi kebijakan luar negeri. Sejak disepakatinya rezim gencatan senjata tahun 1994, Rusia memainkan *leading role* dalam negosiasi berdasarkan kerangka kerja dari Minsk Group dalam konflik Nagorno – Karabakh yaitu antara Armenia dan Azerbaijan. (Peacekeeping_Final_June-1-issue) Dalam upaya penyelesaian konflik Nagorno – Karabakh, Rusia merupakan salah satu anggota dari *co-chairman* OSCE Minsk Group, yang berperan sebagai tim mediator.

OSCE Minsk Group bertujuan menyediakan forum–forum negosiasi yang secara rutin diadakan dan kerangka kerja yang sesuai untuk resolusi konflik sebagai suatu usaha penyelesaian melalui cara damai. (Nasrin Suleymanly, “An Analysis of the Nagorno-Karabakh Problem”, Offset Co. Ltd Press hlm. 87) Meskipun pertemuan bilateral maupun forum bersama dengan Minsk Group masih terus berjalan, dinamika konflik tetap ada. Pada bulan November 2004 seorang tentara Azerbaijan tertembak di dekat perbatasan Karabakh dan pada bulan Januari 2005 satu tentara Azerbaijan kembali tewas tertembak oleh tentara Armenia. (MAR, “Chronology for Armenians in Azerbaijan”, Minorities at Risk Project [16 Juli 2010]) Tidak hanya itu, dari tahun 2006 sampai 2012 tercatat peningkatan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Azerbaijan. Pada tahun 2006 ada sekitar 600 dan terus meningkat sampai mencapai angka 16.300 kali pelanggaran pada tahun 2012. (<http://m.news.am/eng/news/135058.html>) Terlihat jelas bahwa masih ada kontak senjata yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan. Selain itu, blokade ekonomi maupun transportasi masih tetap bertahan. Perjanjian-perjanjian di isu-isu yang sulit seperti status Nagorno – Karabakh dan jaminan keamanan sebagai isu yang sesungguhnya harus diselesaikan juga jarang dihasilkan walaupun negosiasi dan forum sering diadakan.

Ada ketertarikan untuk melihat dengan seksama keterlibatan Rusia dalam upaya resolusi konflik Nagorno – Karabakh disebabkan adanya problematika yang ditunjukkan oleh posisi Rusia yang dilematis yaitu sebagai pemain sekaligus mediator. Keterlibatan Rusia sebagai pihak ketiga sudah ada sejak dimulainya konflik. Rusia merupakan negara pertama dan negara kunci dimulainya proses negosiasi. (Tevan Poghosyan, *Crisis Management Initiatives* hlm. 17). Posisi Rusia sebagai pemain dalam dinamika konflik Nagorno – Karabakh dapat dilihat dari level geopolitik. Beberapa pendapat mengatakan bahwa secara geopolitik, Rusia dipandang mengambil keuntungan dalam “status quo” konflik ini. Melalui partisipasi Armenia dalam CSTO (*Collective Security Treaty Organization*), Rusia dapat meraih keuntungan melalui kerjasama yang terjadi, seperti penempatan pangkalan militernya yang terus diperpanjang hingga 2044 di Armenia.

Rusia menjadikan Armenia sebagai alat untuk menjaga keseimbangan di wilayah Kaukasus Selatan karena melihat Azerbaijan semakin kuat secara ekonomi dan militer. (Guner Ozkan, *International Strategic Research Organization*, hlm. 21) Selain meraih keuntungan di bidang militer, Rusia mengambil sektor-sektor ekonomi penting Armenia melalui akuisisi aset-aset energi. Blokade ekonomi yang dilakukan Azerbaijan kepada Armenia menghambat pertumbuhan ekonomi Armenia sehingga ada ketergantungan ekonomi terhadap Rusia. Rusia juga semakin tertarik dengan Azerbaijan terkait perkembangan rute alternatif transportasi energi dari Caspia Basin (pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan). (*Caucasus Edition: Journal of Conflict Transformation*) Rusia mendukung adanya *status quo* untuk menjaga regional Kaukasus Selatan di bawah pengaruhnya. Persepsi negatif terhadap peran Rusia tidak hanya didukung oleh alasan kepentingan geopolitik Rusia, tetapi juga terjadinya perang Rusia-Georgia tahun 2008. Namun, perang Rusia-Georgia memunculkan ekspetasi tersendiri bagi prospek peran Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno – Karabakh karena alasan memperbaiki citra Rusia yang turun di mata internasional setelah terlibat perang dengan Georgia.

Ekspetasi peran Rusia didukung dengan bukti terciptanya Deklarasi Moskow 2008 yang penandatanganannya dilakukan di Moskow dalam pertemuan trilateral Presiden Armenia, Azerbaijan, dan Rusia.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari penjelasan latar belakang permasalahan posisi Rusia dalam konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno – Karabakh, dilihat dari dua sudut pandang dari keterlibatan Rusia pada konflik ini penulis akan menjelaskan peran Rusia sebagai pihak ketiga dalam konflik ini dan kepentingan Rusia dalam konflik ini, maka pertanyaan penelitian yang dibuat adalah:

Apa Peran Rusia dalam konflik sengketa wilayah di Nagorno – Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa keterlibatan Rusia sebagai pihak ketiga (mediator) dalam upaya resolusi konflik di Nagorno-Karabakh.
2. Menganalisa ada atau tidaknya kepentingan Rusia dalam Konflik di Nagorno – Karabakh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masukan maupun untuk memberikan informasi serta data dalam studi hubungan internasional yang memiliki keterkaitan dengan resolusi konflik dalam menangani konflik antar negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan teknik penelitian.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah pendekatan yang komprehensif untuk memberikan ruang dan kemampuan bekerjasama menyelesaikan konflik dengan cara-cara non-kekerasan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masuk ke dalam suatu proses berbagi informasi, membangun hubungan yang lebih baik, dan bersama-sama menganalisis konflik yang dihadapi. Tujuannya untuk mengenali akar permasalahan, mengubah perilaku (*behavior*) agar tidak lagi memakai cara kekerasan, membuat sikap atau pendirian (*attitude*) yang tidak bermusuhan, dan membuat struktur yang tidak eksploitatif. (Tom Woodhouse & dkk, Peace Operations Training Institute (2000): hlm. 34) Definisi dari resolusi konflik adalah “situasi sosial dimana pihak-pihak yang berkonflik senjata dalam kesepakatan yang sukarela menyelesaikan dengan damai dasar-dasar ketidakcocokan mereka dan menghentikan penggunaan senjata yang melawan satu sama lain. (Wallensteen 2007, hlm. 47)

Dalam proses berjalannya proses resolusi konflik, pihak ketiga dapat mengambil bagian dan berperan di dalamnya. Mediator adalah peran yang sering digunakan dalam perselisihan dan konflik internasional. (Bercovitch, J 1997 hlm.12). Menurut Blake dan Mouton (1985), mediasi adalah proses yang melibatkan intervensi pihak ketiga untuk menginvestigasi, mendefinisikan masalah, dan kemudian mendekati tiap pihak dengan rekomendasi yang didesain sebagai solusi yang dapat diterima bersama. Dalam enam tipologi intervensi pihak ketiga, mediasi dibedakan menjadi dua yaitu mediasi murni dan mediasi kekuatan. Mediasi murni (*pure mediation*) yang mana pihak ketiga menggunakan persuasi, kontrol yang efektif terhadap informasi, dan pemberian usulan alternatif-alternatif untuk memfasilitasi penyelesaian-penyelesaian melalui jalan negosiasi tentang isu-isu yang substansif. Sementara mediasi kekuatan (*power mediation*) adalah mediasi yang mana pihak ketiga juga melakukan mediasi murni namun diselingi dengan penggunaan pengaruh atau unsur paksaan dalam bentuk penghargaan atau ancaman hukuman. (Fisher, RJ 2001 hlm 10)

Terdapat tujuh elemen keahlian yang dimiliki oleh sosok mediator, antara lain: (1) Penjelajah (*explorer*) yang mensketsa susunan kemungkinan-kemungkinan solusi alternatif, (2) *Decoupler* yang membantu menarik keluar patron atau penyokong eksternal dari pusat konflik, (3) Inisiator yaitu kegiatan memprakarsai proses *peacemaking* seperti mengadakan gencatan senjata dan diskusi sehingga pihak yang berkonflik melihat ada kemungkinan untuk mencapai solusi yang disepakati bersama, (4) Fasilitator yang memfasilitasi pertemuan para pihak yang berkonflik, seperti memimpin pertemuan serta menginterpretasikan posisi dan respon, (5) Penyokong yaitu memberikan prosedur-prosedur untuk membantu pihak yang berkonflik dalam menerima proses dan hasil, (6) Pembangun atau *enhancer* yang menyediakan sumber daya tambahan untuk membantu pihak yang berkonflik dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan (*positive-sum*), dan (7) *Reconciler* yaitu menjalankan aksi jangka panjang untuk merubah sikap, *stereotype*, dan *citra* pihak-pihak yang berkonflik sehingga terbangun hubungan yang baru dan lebih baik. (C.R Mitchell "Conflict Parties and Actors" 1993)

Melihat pada penjelasan tentang teori resolusi konflik penelitian mengangkat Rusia sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai mediator dalam konflik sengketa wilayah di Nagorno – Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Mediator mempunyai peran sebagai penengah dalam konflik dan berperan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang sedang dalam konflik untuk mengusulkan dan mengadakan perdamaian.

1.5.2 Teori Peran

Teori peran atau *role* adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional dimana tindakan ini dilakukan oleh organisasi atau negara atau aktor lainnya yang telah menduduki suatu posisi tertentu, untuk menangani masalah yang ada terkait bidangnya. (Soekanto, Soerjono, 2001, hlm 268). Peran adalah salah satu aspek dinamis suatu kedudukan, sederhananya apabila suatu aktor hubungan internasional melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan

suatu peranan. Peran dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu.

Peran ini bergantung pada posisi dan kedudukan struktur tersebut dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peran juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari si pemegang peran. Mengacu dengan penjelasan teori peran diatas, Rusia dikategorikan mempunyai tugas berupa peran dalam menengahi konflik sengketa wilayah di Nagorno – Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Tugas Rusia sebagai mediator dalam konflik tersebut adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik, menyediakan tempat berlangsungnya proses perdamaian kedua belah pihak yang sedang berkonflik yaitu antara Armenia dan Azerbaijan. Selain itu Rusia juga berperan sebagai anggota tim co-chairman dalam OSCE Minsk Group dalam sengketa wilayah di Nagorno – Karabakh.

1.6 Tinjauan Pustaka

i. **Orkhan Gafarov “Russia as an Obstacle in the Settlement of Nagorno-Karabakh Conflict”**

Dalam jurnal ini dijelaskan untuk menciptakan kesatuan politik-sosial sendiri Rusia berusaha untuk menjaga wilayah bekas Uni Soviet dibawah kendali penuh, disisi lain Rusia menciptakan kondisi yang mengarah pada konflik etnis di Kaukasus Selatan. Jika selama ini Armenia telah tegas menerapkan kebijakan orientasi dari Rusia, Azerbaijan dan Georgia telah mencoba untuk membangun keseimbangan antara kekuatan geopolitik negaranya. Wilayah Kaukasus Selatan seperti pada konflik antara Armenia dan Azerbaijan merupakan orientasi dari kebijakan luar negeri Rusia. Dalam hal ini Rusia lebih berpihak terhadap Armenia karena Rusia mengetahui bahwa Azerbaijan tidak akan melakukan sesuai dengan pilihan kebijakan luar negeri Rusia. Penandatanganan jangka panjang kontrak energi dengan barat dan rencana kerjasama dengan NATO. Ada ketertarikan untuk melihat dengan seksama keterlibatan Rusia dalam upaya resolusi konflik Nagorno-Karabakh disebabkan adanya problematika yang ditunjukkan oleh posisi Rusia yang dilematis yaitu

sebagai *player* (pemain) sekaligus mediator. Keterlibatan Rusia sebagai pihak ketiga sudah ada sejak dimulainya konflik. Rusia merupakan negara pertama dan negara kunci dimulainya proses negosiasi.

Keterkaitan antara jurnal ini dengan penelitian ini adalah bahwa adanya keterkaitan Rusia terhadap permasalahan etnis di kawasan Kaukasus yang sengaja dibuat oleh Rusia maupun tidak. Tetapi penjelasan dari jurnal ini lebih menegaskan bahwa Rusia lah yang menjadi sumber konflik antara Armenia dengan Azerbaijan. Keikutsertaan Rusia dengan menjadi mediator konflik antara Armenia dan Azerbaijan menjadi sebuah bukti bahwa Rusia ingin memainkan dominasinya di wilayah Kaukasus.

ii. **Anahit Shirinyan “Assessing Russia's Role in Efforts to Resolve the Nagorno- Karabakh Conflict: From Perception to Reality”**

Dalam research jurnal ini dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Nagorno – karabakh, Armenia dan Azerbaijan harus menjadi pihak utama paling tertarik pada 'geopoliticalisation' konflik. Hanya dalam kaitannya dan bekerjasama satu sama lain baik dapat melestarikan kepentingan nasional yang penting dan mencari solusi menang-menang. Fakta bahwa mengatakan Rusia diberikan sangat penting di semua lini, sedangkan pihak utama konflik - republik de facto dari Nagorno-Karabakh - tetap absen dari proses perdamaian juga menunjukkan logika agak cacat di balik proses perdamaian yang sedang berlangsung dan batas-batas dari apa yang dapat dicapai. Terlepas dari apa kepentingan ketiga sisi yang terlibat, itu adalah hak prerogatif dari Armenia dan Azerbaijan untuk mencapai penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Kunci untuk resolusi konflik adalah tidak di Moskow atau di tempat lain, tapi di Armenia, Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah terletak pada aktor-aktor yang membantu. Bila dalam jurnal ini ditegaskan bahwa Armenia dan Azerbaijan harus menjadi pihak utama dalam penyelesaian konflik, tetapi dalam perjalanan konflik antara Armenia dan Azerbaijan ini tidak terlepas

bantuan dari pihak ketiga yang berperan sebagai mediator konflik yaitu Rusia dan OSCE Minsk Group.

iii. Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota “Nagorno-Karabakh – conflict unfreezing”

Jurnal ini menjelaskan Konflik antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno Karabakh merupakan tantangan terbesar bagi keamanan dan stabilitas Kaukasus Selatan. Meskipun gencatan senjata telah berada di tempat dan proses perdamaian berlangsung sejak tahun 1994, ada kekhawatiran bahwa ancaman kembalinya aksi militer berkembang. Bukti yang diberikan oleh, misalnya, perlombaan senjata didikte oleh Azerbaijan dan penggunaannya retorika perang. Faktor utama, selain meningkatkan potensi dan ambisi, yang mendestabilisasi situasi tentang Karabakh Azerbaijan tampaknya menjadi situasi geopolitik yang berubah di wilayah ini. Meskipun pecahnya perang baru selama Nagorno – Karabakh tampaknya tidak mungkin (karena hal ini akan berisiko untuk semua aktor yang terlibat) dalam tahun depan, jika tren ini terus berlanjut, ini akan sulit untuk menghindari di masa depan. Sebuah peningkatan lebih lanjut dalam ketegangan, dan terutama konflik militer (apapun hasilnya), akan menyebabkan perubahan yang mendalam dalam situasi di Kaukasus Selatan dan dalam kebijakan negara-negara yang aktif di wilayah ini.

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konflik yang terjadi atas wilayah Nagorno – Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan menjadi fokus yang dikatakan dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kaukasus Selatan. Walaupun telah mengalami peperangan dan kedua belah pihak telah menandatangani untuk gencatan senjata pada tahun 1994, namun perselisihan yang terjadi masih berlanjut hingga kini. Hal-hal seperti penembakan tentara antar kedua belah pihak, pelanggaran garis kontak (*Line of Contact*) atau garis batas negara, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya menajadi penyebab sulitnya proses perdamaian. Pada penulisan penelitian ini penulis akan menjelaskan dinamika konflik yang terjadi dimulai dari tahun 2010 hingga 2013.

1.7 Alur Pemikiran



1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yang meliputi data-data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar dan juga internet. Data-data tersebut akan penulis gunakan dalam penulisan ini dan penulis akan menganalisa menggunakan teori yang telah ditetapkan.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli

atau sumber pertama berupa dokumen resmi. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga penulis hanya mencari dan mengumpulkan seperti buku, jurnal, surat kabar, laporan atau tulisan orang lain, dan lembaga pengkajian yang sudah dipublikasikan serta melalui media *online*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.4 Teknik Analisa Data

Data yang didapat kemudian dikelola untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, operasionalisasi konsep, asumsi, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Presepsi Armenia dan Azerbaijan Terhadap Dinamika Konflik di Nagorno-Karabakh

Bab kedua akan membahas mengenai perbedaan posisi status dari Nagorno – Karabakh dilihat dari sisi Armenia dan Azerbaijan berdasarkan faktor sejarah, geografis, dan teritorial, serta menjelaskan awal mula konflik sampai sekarang.

BAB III : Peran Rusia Dalam Menangani Konflik Antara Armenia dan Azerbaijan

Bab ketiga akan membahas mengenai keterlibatan Rusia sebagai mediator konflik di Nagorno – Karabakh. Rusia menyadari pentingnya perbaikan hubungan antara Armenia dengan Azerbaijan dan menyatakan bahwa Rusia berusaha untuk mendekatkan hubungan kedua negara. Pada bab ini juga dijelaskan tentang kepentingan Rusia yang berperan sebagai mediator pada konflik tersebut.

BAB IV : Kesimpulan

Bab terakhir ini berisi jawaban atas rumusan permasalahan dan berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya.

